

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Povinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10

desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Orang Kuantan menggunakan ‘Bahasa Melayu Dialek Kuantan’ sebagai bahasa perhubungan. Mereka sangat fanatik dalam mempergunakan bahasa daerahnya. Orang Kuantan yang berada di luar daerahnya jika bertemu dengan sesama, akan mempergunakan Bahasa Melayu Dialek Kuantan itu, yang masih erat hubungannya dengan Bahasa-bahasa Melayu di wilayah Provinsi Riau lainnya. Agama yang dianut orang Kuantan adalah Agama Islam. Mereka sangat mementingkan pendidikan yang tidak ketinggalan jika dibandingkan orang-orang Riau lainnya. Sebagian besar orang Kuantan bermata pencaharian petani (padi), peternak (sapi/kerbau), nelayan, buruh, pedagang, PNS dan lainnya.

Tradisi budaya dan sastra banyak dijumpai di Rantau Kuantan. Pacu Jalur merupakan tradisi yang sangat disukai orang-orang Rantau Kuantan. Olahraga Tradisional Pacu Sampan panjang ini merupakan tradisi yang sudah lama dijumpai di Rantau Kuantan. Selain itu Rantau Kuantan juga kaya akan tradisi Sastra. Misalnya Kayat, Koba (Kaba atau Nyanyian Panjang), Pantun Seratus, Rarak dan Randai. Melalui Randai banyak cerita yang disampaikan.

Pantun Seratus merupakan pantun yang diciptakan secara spontanitas, yang lahir begitu saja sesuai situasi dan tuntutan pada saat berpantun. Demikian juga dengan kebiasaan bercerita, telah disampaikan secara turun temurun.

Pacu Jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada ibu kota kabupatennya yaitu Taluk Kuantan yang berada di sepanjang sungai Kuantan. Pada awalnya di maksudkan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Maulid Nabi, ataupun peringatan tahun baru Hijriah. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia. Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung perahu panjang, semacam perlombaan Perahu naga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura, yaitu sebuah perahu atau sampan yang terbuat dari kayu pohon yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Di daerah Taluk Kuantan sebutan untuk perahu panjang tersebut adalah Jalur. Adapun tim pendayung perahu (jalur) ini berkisar antara 50 - 60 orang.

Beberapa kawasan wisata yang ada di kabupaten kuantan singing yaitu anantara lain, Tambang Emas di Logas, Arung Jeram di

Sungai Singingi dan Pangkalan Indarung, Hutan Lindung Bukit Bungkok dan Bukit Baling di Singingi, Gua Bunian di Bukit Kanua, kawasan Hiking dan Tracking di Bukit Batabuah. Rumah Tradisional Tua Koto Rajo, Kompleks Candi Sangan.

2. Batas Wilayah

Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

3. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut.

4. Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan

tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut.

5. Geologi

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

6. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c – 22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

7. Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting

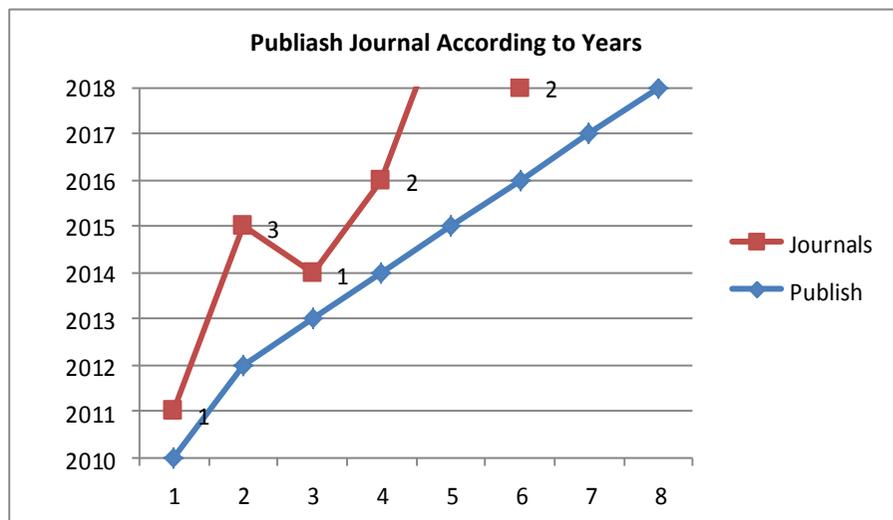
terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian dan hasil hasil wawancara dengan informan penelitian serta dari 30 jurnal dari tahun 2010 sampai dengan 2018 menghasilkan data yang beragam dan bervariasi. Hal tersebut akan dijabarkan perbagian sehingga tidak mengakibatkan ketimpangan hasil. Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki *software* QSR NVivo 12 dalam analisis data kualitatif, peneliti tertarik menggunakan

Analisis 30 jurnal di atas digunakan untuk mencari penelitian terdahulu yang dominan dalam pelaksanaan transparansi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kapupaten Kuantan Singingi. Jurnal yang digunakan dalam jangkauan waktu 9 tahun terakhir dari terbitan tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Klasifikasi pembagian jurnal per tahun dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 2 Terbitan Jurnal Berdasarkan Tahun

Dari analisis di atas maka ditemukan bahwa dalam dari kurun waktu 9 tahun ditemukan bahwa penelitian tentang *Good Government* khususnya transparansi pelayanan mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Jurnal artikel ilmiah digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini dan saling berkaitan dengan hasil wawancara yang

dilakukan peneliti kepada informan, kombinasi hasil wawancara dan beberapa sumber lainnya dijelaskan pada penjelasan beriku:

**1. Transparansi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Klasifikasi Kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi.**

Dalam pelaksanaan transparansi diketahui bahwa beberapa indikator memang telah ditetapkan untuk mengukur apakah sebuah pengukuran tersebut dapat diterapkan dalam prinsip transparansi pelayanan khususnya pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan. Indikator dalam pelayanan transparansi tentunya sangat penting dalam pelaksanaannya. Ada Tiga indikator untuk mengukur tranparansi pelayanan publik:

- a. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.
- b. Indikator kedua dari transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain.

Transparansi adalah masalah utama dalam pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik untuk meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi tentang anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam konteks fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan mengakibatkan gangguan. Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi mandat untuk mengelola dana dari masyarakat, sehingga keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana sangat tergantung pada lembaga pemerintah daerah yang mengimplementasikannya. Pengelolaan dana dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Adiputra dkk, 2018).

Indikator yang berkaitan dengan transparansi salah satunya adalah transparansi kemudahan informasi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa akses informasi sudah sangat mudah karena pengguna dapat mengakses online melalui web yang sudah disediakan. Sayangnya tidak semua masyarakat dapat mengakses internet dengan baik sehingga dirasa cukup sulit untuk mengakses informasi. Sesuai dengan teori yang

dikemukakan oleh Hari Sabarno (2007:38) perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Selain kemudahan informasi hasil wawancara juga menunjukkan bahwa informasi mengenai ada tidaknya biaya dalam pelayanan SIUP klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir sudah disampaikan secara terbuka. Informan penelitian menjelaskan bahwa pihak Kecamatan Singingi Hilir sudah menyediakan website yang didalamnya sudah disampaikan informasi rinci terkait dengan biaya layanan SIUP walaupun pelayanan oleh aparatur informasi yang diperlukan hanya seadanya. Permasalahan tersebut selama ini bisa langsung diatasi.

Kecamatan Singingi Hilir juga menyediakan akses untuk menyampaikan keluhan menggunakan kotak saran, namun saat ini dirasa kurang efektif oleh masyarakat karena tidak ada akses komunikasi yang cepat tanggap untuk menyampaikan keluhan. Namun adanya kendala tersebut aparatur berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan. Upaya mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan yang berkualitas dilaksanakan oleh Kecamatan Singingi Hilir dengan berbagai strategi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk mempermudah upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, pemerintah memerlukan berbagai strategi.

Kecamatan Singingi Hilir telah melakukan beberapa upaya untuk menyampaikan informasi ini kepada setiap pemohon. Di beberapa sudut ruangan pelayanan perizinan telah terpampang syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus dilalui bagi para pemohon untuk menerbitkan SIUP-nya. Kecamatan Singingi Hilir juga menayangkan informasi mengenai syarat dan prosedur pelayanan SIUP melalui media TV yang ada di dua sudut ruangan pelayanan perizinan. Selain itu, dalam struktur organisasi Kecamatan Singingi Hilir juga terdapat sub bidang informasi dan pengaduan yang bertugas untuk memberikan informasi bagi para pemohon mengenai penerbitan SIUP ini.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan SIUP klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Transparansi Birokrasi dalam Standar penyelenggaraan Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

Diperlukan juga sejumlah faktor penunjang seperti dukungan kebijakan, ketersediaan teknologi, kemampuan pegawai, dukungan dan kesadaran warga, kecukupan anggaran, komitmen pegawai, pengawasan dan sanksi, budaya kerja, dan pola pelayanan yang tepat, di dalam Birokrasi itu sendiri. Faktor lain adalah kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keterampilan tugas, sarana dan prasarana.

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prinsip transparansi dalam pelayanan SIUP klasifikasi kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dari aspek kesadaran aparatur yang bersangkutan sudah semaksimal mungkin dalam memberikan layanan. Pelayanan aparatur yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat merasakan ketidakpuasan dengan pelayanan aparatur. Sehingga sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki

sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbis pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Tentunya dibutuhkan aturan atau Standar Operasional Prosedur yang jelas dan mudah dipahami oleh kalangan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan SIUP di Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan dijalankan semaksimal dan seefektif mungkin. Anggaran pelayanan SIUP digunakan sebaik mungkin dan ada transparansi bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan anggaran sudah mampu mencukupi anggaran karena digunakan semaksimal mungkin. Dari aspek kelengkapan sarana prasarana yang tersedia diantaranya ruang kerja, ruang arsip, gedung serbaguna dan kamar mandi. Sedangkan pasarana yang ada seperti kompuer, namun masih terbatas, dan hanya sedikit yang memakai laptop pribadi namun masih bisa digunakan dalam memberikan pelayanan.

Selain faktor kesadaran, aturan, organisasi, pendapatan, keterampilan tugas, sarana dan prasarana ditemukan beberapa faktor yang lain yang terlibat dalam memperoleh partisipasi publik sebesar mungkin dalam proses pemberian layanan. Ini dikelompokkan sebagai (1) faktor yang memfasilitasi pemberian layanan, dan (2) faktor yang menghambat pemberian layanan. Faktor-faktor yang memfasilitasi adalah partisipasi publik, akuntabilitas dan transparansi, orang-orang yang fokus, komunikasi, perwakilan gender, dan hubungan yang sehat. Faktor yang menghalangi adalah perebutan kekuasaan. Untuk 'wilayah tempat tinggal', perbedaan signifikan hanya ada sehubungan dengan faktor fasilitator (Naidoo dan Ramphal, 2018).

Hasil penelitian Adiputra dkk (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan melalui opini audit dan lingkungan politik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Di sisi lain, ukuran pemerintah daerah dan tingkan tanggapan pemerintah daerah terhadap peraturan tersebut tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa teori keagenan, legitimasi dan kelembagaan memainkan peran penting dalam mendukung praktik transparansi pemerintah daerah di

Indonesia. Konsekuensinya, teori harus digunakan sebagai alasan dan studi dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dilihat dari aspek keuangan dan non-keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah memiliki akuntabilitas melalui transparansi informasi keuangan dan non-keuangan melalui situs web sesuai dengan peraturan yang ada tentang pelaksanaan pemerintah daerah (Adiputra dkk, 2018).

Hasil analisis menjelaskan bahwa jurnal tahun 2015 yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *good government* dalam aspek transparansi pelayanan. Dua peneliti yang berpendapat berbeda antara faktor yang mempengaruhi transparansi dan faktor yang menghambat dilakukan oleh Joseph (2015) dan Aeman *et al.*, (2015).

Kontribusi pemerintah dalam berbagai banyak administrasi publik baru agenda dalam memastikan bahwa biaya untuk publikasi pengiriman layanan sangat berkurang, ada efisiensi dan efektifitas dalam ketentuan pelayanan publik, fasilitas yang mendukung, masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas yang terus dilaksanakan secara maksimal dan

menanggapi kebutuhan masyarakat (Joseph, 2015). Selain faktor yang mempengaruhi tentu ada faktor yang menghambat transparansi.

Beberapa faktor yang menghambat transparansi dalam sistem pemerintah daerah yaitu pertama perumusan kebijakan yang mengarahkan transparansi tata kelola tidak jelas. Kedua ada layanan agrogansi pejabat pemerinta. Ketigaada efek dari sistem pemerintahan otoriter untuk yang baru memerintahkan agar berlama-lama di lembaga birokrasi di daerah. Keempat, ada kekurangan sumber dayaberualitas dari pemerintah daerah pejabat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi konsep transparansi dan hukum terkait (Aeman et al., 2015).